

OPEN ACCESS

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BERBASIS RUMAH (*HOME-BASED ENTERPRISES/HBE*) DI KOTA SEMARANG, SURAKARTA, BOYOLALI, SALATIGA, DAN SURABAYA

Jurnal Pengembangan Kota (2020)

Volume 8 No. 1 (78–89)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.8.1.78-89

Wido Prananing Tyas, Onixtin O. Sianturi, Julius Kevin P.H.

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik

Universitas Diponegoro

Abstrak. *Home based Enterprises* (Usaha Rumah Tangga) yaitu usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan rumah/bagian rumah dan pekarangan untuk meningkatkan penghasilan keluarga. Perkembangan UMKM berbasis rumah tidak terlepas dari adanya peran pemerintah sebagai stakeholder dalam upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan kebijakan dan program yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kebijakan yang merupakan suatu langkah penting dalam penentuan upaya yang akan dilaksanakan. Keberhasilan dalam kebijakan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada stakeholder yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan di wilayah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang mendukung dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah (HBE) dalam meningkatkan usaha. Melalui analisis ini, dapat dilihat identifikasi kebijakan pendukung dalam berkembangnya usaha. Adapun penelitian ini dilakukan melalui studi kasus 5 kota yaitu industri rumah tangga (IRT) yang berlokasi di Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kota Semarang dan Kota Surabaya yang mewakili berbagai tipe industri berbasis rumah (*home based industry*) yaitu kecil/tradisional, menengah dan besar/orientasi ekspor di kota kecil, menengah dan besar. Metode yang dilakukan adalah dengan membandingkan berbagai program dalam mendukung keberadaan UMKM industri di 5 kota berdasarkan telaah dokumen serta FGD atau wawancara. Dokumen berupa kebijakan atau program pendukung UMKM dan FGD dilakukan dengan mengundang pemangku kebijakan terkait pengembangan UMKM serta pelaku usaha dari 4 kota di Propinsi Jawa Tengah tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah berperan dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah ini dengan berbagai program yang telah dilakukan. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi salah satu kunci berkembangnya UMKM berbasis rumah.

Kata kunci : UMKM berbasis rumah (HBE); Kebijakan; Kewirausahaan

[Title: Government Policy Analysis in The Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) of Home-Based Industries (HBIs) in The City of Semarang, Surakarta, Boyolali, Salatiga, and Surabaya]. *Home Based Enterprises (HBEs), namely businesses or activities carried out by using the house/part of the house and yard, has a goal to increase the family's income. The role of government seems vital to the development of HBEs based on existing policies and programs. The success of decisions on solving particular problems depends very much on the stakeholders, particularly the government with policies and programs, involved and playing a role in development in urban areas. This study aims to analyze policies that support the development of micro, small, medium enterprises (MSMEs) and particularly home-based industries (HBIs) in increasing business. The focuses of analysis are the supporting policies in developing the business. The research conducted through a case study of 5 cities, namely home industries (IRT) located in Salatiga City, Boyolali Regency, Surakarta City, Semarang City, and Surabaya City which represent various types of home-based industries, namely small/traditional, medium and large/export orientation in small, medium and large cities. The method used is to compare various programs to support the existence of industrial HBIs in 5 cities based on document review and FGD or interviews. Documents in the form of policies or supporting programs for SMEs and FGDs were carried out by inviting policymakers related to the development of HBIs or SMEs and business actors from 4 cities in Central Java Province. This research shows the role of government in the development of SMEs for this home-based industry with various programs. Therefore, the role of government is one of the keys to the development of home-based industries.*

Keyword: Home-based Enterprises (HBEs); Policies; Entrepreneurship

1. PENDAHULUAN

Kewirausahaan sebagai salah satu pilar penggerak perekonomian masyarakat dapat dimulai dari rumah. Salah satu manifestasi utama urbanisasi dilihat dari meningkatnya aktivitas UMKM berbasis rumah (*Home Based Enterprise* atau disingkat HBE) di lingkungan perumahan perkotaan (Broaddus, 2012). Aktivitas ekonomi yang dilakukan di rumah dapat menghasilkan keuntungan yaitu biaya yang kecil karena memanfaatkan sumber daya rumah tangga, terutama ruang dan utilitas (Tippel, 2004). Unit perumahan saat ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan hunian (*shelter*), namun juga menjadi akomodasi bagi keluarga sebagai sumber pendapatan utama atau tambahan sebagai bagian atau keseluruhan proses produksi (KelleTT, 1995). Tidak hanya bagi keluarga, HBE berperan penting dalam peningkatan pendapatan dalam skala lebih luas seperti kawasan bahkan kota (Gough, 2010).

HBE memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi ekonomi yang positif dan signifikan seperti menciptakan iklim ekonomi bisnis yang kreatif (Samtono, 2016). Hal tersebut menyebabkan keberadaan HBE menjadi usaha penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya studi tentang UMKM berbasis rumah yang sudah berkembang di beberapa wilayah akan mewakili penelitian ini. Melalui studi UMKM berbasis rumah di kawasan Tumang Kabupaten Boyolali dapat dilihat identifikasi karakteristik industri rumahan kerajinan logam dari bersifat yang tradisional dan kecil sampai yang berorientasi ekspor. Untuk industri pengolahan pangan akan diidentifikasi di kawasan Desa Ledok Kota Salatiga dalam pengolahan pangan terutama singkong untuk pasar lokal dan nasional yaitu sebagai tempat singgah bagi para pencari buah tangan dari berbagai pendatang dari luar kota, yang bertumbuh karena permintaan pasar. Wilayah studi ketiga adalah pengolahan pangan di Kota Surabaya yaitu Kampung Lontong yang berorientasi pasar lokal atau untuk skala Kota Surabaya dan sekitarnya. Adapun wilayah studi berikutnya adalah kawasan industri rumahan penghasil pengolahan bandeng di Semarang, serta

kampung batik di Kota Surakarta untuk mewakili industri rumahan di kota besar dan kota menengah di perkotaan.

Perkembangan UMKM berbasis rumah tidak terlepas dari adanya peran pemerintah sebagai *stakeholder* dalam upaya pemberdayaan UMKM berdasarkan kebijakan yang ada (Nohong, Sanusi, Nurqamar, & Harun, 2018; Osano, 2019). Oleh karena itu, dibutuhkan analisis kebijakan yang merupakan suatu langkah penting dalam penentuan upaya yang akan dilaksanakan (Caniëls, Lenaerts, & Gelderman, 2015). Keberhasilan dalam kebijakan terhadap penyelesaian satu masalah tertentu sangat tergantung pada *stakeholder* yang terkait dan berperan langsung dalam pembangunan di wilayah perkotaan, terutama di 5 (lima) wilayah studi.

Berdasarkan latar belakang yang dibahas sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendukung dalam pengembangan UMKM industri berbasis rumah (HBE) sebagai peningkatan pendapatan pelaku usaha. Melalui analisis ini, dapat dilihat identifikasi kebijakan pendukung dalam berkembangnya usaha. Penelitian dengan pendekatan retrospektif belum pernah dilakukan dalam mengkaji kebijakan dan program penerapan UMKM di berbagai kota. Oleh karena itu, studi kebijakan pendukung kebijakan dan program 5 kota ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses evaluasi kebijakan dan program yang ada.

Menurut Carl, Sawicki, dan Clark (2012), analisis retrospektif mengacu pada deskripsi dan interpretasi atas apa yang terjadi pada kebijakan masa lalu. Analisis ini dapat memainkan peran penting dalam memprioritaskan dan melegitimasi tindakan peraturan saat ini dan di masa depan

ISSN 2337-7062 © 2020

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2020

*Email @w.p.tyas@pwk.undip.ac.id

Diterima 17 Maret 2020, disetujui 28 Juni 2020

(Cropper, Fraas, & Morgenstern, 2017). Analisis retrospektif baiknya dilakukan sejak sebuah peraturan pertama kali dikembangkan, sehingga dapat dengan jelas mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menjabarkan hubungan sebab akibat antara intervensi peraturan dan hasil yang diinginkan, dan menetapkan kerangka kerja untuk pengujian empiris asumsi dan hasil yang dihipotesiskan (Dudley, 2017).

Menurut Dunn (2000), analisis retrospektif adalah salah satu model analisis kebijakan yang merupakan penciptaan dan transformasi informasi sesudah kebijakan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analisis, yaitu:

1. Analisis yang berorientasi pada disiplin
Pada analisis ini jarang menghasilkan informasi yang secara langsung bermanfaat untuk merumuskan pemecahan atas masalah-masalah kebijakan, terutama karena variabel-variabel yang paling relevan bagi pengujian-pengujian teori ilmiah umum juga jarang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk melakukan manipulasi kebijakan.
2. Analisis yang berorientasi pada masalah
Analisis yang berorientasi pada masalah tidak menaruh perhatian pada pengembangan dan pengujian teori-teori yang dianggap penting di dalam disiplin ilmu sosial, tetapi lebih menaruh perhatian pada identifikasi variabel-variabel yang dapat dimanipulasi oleh para pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah. Analisis yang berorientasi pada masalah jarang menyajikan informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan yang spesifik dari para pembuat kebijakan.
3. Analisis yang berorientasi pada penerapan
Menerangkan sebab dan konsekuensi kebijakan-kebijakan dan program publik, tetapi tidak menaruh perhatian terhadap pengembangan dan pengujian teori-teori dasar. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan. Informasi mengenai tujuan-tujuan dan sasaran kebijakan memberi landasan bagi pemantauan dan evaluasi hasil kebijakan yang spesifik, yang dapat digunakan oleh praktisi untuk merumuskan masalah-masalah kebijakan, mengembangkan alternatif

kebijakan baru, dan merekomendasikan arah tindakan untuk memecahkan masalah.

Moja (2003) menyatakan bahwa kebijakan retrospektif menghasilkan informasi, yang secara langsung berguna untuk pengambilan keputusan akibat perkembangan metode ilmiah yang tidak memungkinkan adanya manipulasi data oleh pembuat kebijakan. Analisis retrospektif penting untuk dilakukan karena dapat menyelidiki apakah peraturan tersebut memiliki dampak yang diinginkan. Selain itu, jika suatu peraturan tidak sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuannya, analisis retrospektif dapat membantu mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan peraturan tersebut (Cropper, Morgenstern, & Rivers, 2018). Menurut Hüscherlath dan Leheyda (2010), retrospektif memainkan peran dalam membandingkan kebijakan terutama saat digunakan untuk penilaian keputusan yang diambil sehingga dapat berkontribusi untuk meningkatkan kualitas kebijakan dimasa depan. Hasil studi retrospektif dapat menyarankan perubahan aturan untuk meningkatkan efisiensi program regulasi, meskipun studi tersebut hanya dapat melengkapi dan tidak menggantikan analisis prospektif yang cermat (Lutter, 2013).

Menurut Grindle (1980), implementasi kebijakan menyangkut dalam masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh hasil dari kebijakan, sehingga implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan perlu bersifat situasional mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Solichin, 1987). Dalam model Van Meter dan Van Horn, ada enam *actor* yang dapat meningkatkan kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi, *actor*-variabel tersebut adalah *actor* dan sasaran kebijakan, komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas, karakteristik organisasi komunikasi antar organisasi, kondisi *actor*, ekonomi dan politik, sumber daya, sikap pelaksana (Keban, 2004).

Pada dasarnya *actor* kinerja untuk menilai derajat pencapaian *actor* dan sasaran kebijakan dapat dijelaskan bahwa kegiatan itu melangkah dari tingkat kebijakan yang masih berupa dokumen peraturan menuju penentuan standar spesifik dan konkrit dalam menilai kinerja program. Dengan

actor dan sasaran dapat diketahui seberapa besar keberhasilan program yang telah dicapai. Ripley dan Franklin (1986), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan atau program dapat ditunjukkan dari tiga factor yaitu:

1. Perspektif kepatuhan (*compliance*) yang mengukur implementasi dari kepatuhan *street level bureau crats* terhadap atasan mereka.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tidak adanya persoalan.
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.

Secara sederhana ketiga factor di atas merupakan suatu kepastian dalam menilai keberhasilan suatu implementasi kebijakan sehingga berpengaruh terhadap kinerja kebijakan tersebut. Analisis kebijakan merupakan suatu hal yang penting dalam keberlangsungan suatu program untuk melihat kesesuaiannya dalam mencapai tujuan, sehingga kedepannya kebijakan tersebut memiliki tata kelola yang baik dan jelas. Pada penelitian ini difokuskan pada analisis penerapan kebijakan dan program yang mendukung UMKM berdasarkan apa yang dirasakan pelaku usaha dalam FGD.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini membandingkan 5 wilayah dapat dilihat pada Gambar 1 yang memiliki UMKM berbasis rumah yang dengan berbagai variasi yaitu mulai beroperasi dan tingkat perkembangan usaha, orientasi pasar keterlibatan pemerintah dalam mendukung pelaku usaha. Oleh karena itu, 5 kasus tersebut yang dipilih dengan pertimbangan :

1. Desa Kerajinan Logam-Tumang, Boyolali; merupakan UMKM berbasis rumah yang sudah dimulai sejak berpuluh bahkan berabad tahun yang lalu, diawali dengan pembuatan kerajinan logam seperti kuningan dengan untuk alat dapur tradisional. Dalam perkembangannya, kawasan sentra kerajinan logam ini mampu bertahan dan menyesuaikan dengan keinginan pasar. Bahkan rumah tangga yang menghasilkan kerajinan logam semakin bertambah, dan bahkan melayani pasar ekspor. Seperti juga sentra gerabah Kasongan Bantul merupakan usaha yang dilakukan di rumah, di Kawasan Tumang sendiri usaha ini sudah

dilakukan berpuluh tahun bahkan berabad-abad yang lalu, dengan cara tradisional namun memiliki pasar internasional.

2. Kampung Getuk-Ledok, Salatiga; merupakan UMKM berbasis rumah yang diawali di tahun 2006 dengan suatu usaha pengolahan makanan tradisional berbahan baku singkong dan akhirnya diikuti oleh tetangganya dalam berusaha kuliner makanan tradisional yang lain yang berkembang di kawasan tersebut. Adapun makanan tradisional tersebut tidak hanya dibeli oleh warga kota Salatiga, tetapi justru banyak pembeli dari luar kota yang membeli produk makanan sebagai buah tangan khas Salatiga.
3. Kampung Lontong–Banyu Urip Lor, Surabaya; merupakan kampung penghasil lontong di Kota Surabaya dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah dalam pengembangannya. Usaha tersebut sudah ada sejak 1980an, diawali dari 1 pengusaha rumahan saja, namun kemudian berkembang menjadi ratusan usaha rumahan. Lontong tersebut dipasarkan ke Kota Surabaya dan sekitarnya merupakan hasil dari usaha rumahan yang sekarang sudah menjadi sumber pendapatan bagi ratusan rumah tangga di kawasan tersebut.
4. Kampung Pengolahan Bandeng–Krobakan, Semarang; merupakan kampung penghasil pengolahan bandeng di Kota Semarang. Walaupun belum terlalu banyak pelaku usaha ini di kampung tersebut, namun usaha ini mendukung usaha kuliner terkemuka di Kota Semarang dan menjadi sumber pendapatan bagi pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.
5. Kampung Batik Laweyan dan Kauman-Solo/Surakarta; merupakan kampung penghasil batik yang sudah dikenal masyarakat umum dan sudah melakukan aktifitas ini sejak lama. Usaha industri rumahan ini berkontribusi penting tidak hanya bagi pelaku usahanya, namun juga bagi Kota Surakarta.

Adapun populasi pelaku UMKM berbasis rumah di 5 kasus bervariasi, yaitu lebih dari 100 KK di Surabaya, Tumang-Boyolali dan Kampung batik Laweyan-Surakarta, serta belasan di Ledok, Salatiga dan kampung Kranggan-Semarang. Untuk

kasus di Ledok, Salatiga, dan kampung Kranggan Semarang akan dilakukan wawancara untuk semua pelaku usaha, sedangkan di tempat lain juga dilakukan wawancara minimal 15 KK untuk tiap lokasi. Dipilihnya 5 lokasi tersebut karena kemampuannya untuk mewakili UMKM berbasis

rumah terutama di bidang industri pengolahan dengan karakter kota kecil (Salatiga), menengah (Boyolali dan Surakarta) dan besar (Surabaya dan Semarang) dengan berbagai tipe yang ada. Berbagai kasus tersebut di perbandingkan dan dianalisis dalam *multiple cases* (Yin, 2009).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Pengambilan data adalah melalui kuesioner, wawancara, observasi dan FGD. Pengumpulan data dilakukan sejak bulan Juni 2017 sampai dengan November 2018 terakhir dengan FGD. Data kuesioner untuk mendapatkan gambaran umum dan tipe usaha. Dari responden terpilih, dilakukan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) terhadap beberapa pelaku UMKM berbasis rumah terpilih. Wawancara selain dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dari pelaku, namun juga dilakukan kepada tokoh masyarakat dan pemerintah terkait dengan pengembangan UMKM berbasis rumah.

Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik analisis kebijakan retrospektif. Analisis tersebut digunakan untuk

menganalisis aspek pelaksanaan atau penerapan kebijakan dan program terutama sebab dan konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learnt*) pengembangan UMKM berbasis rumah. Model ini biasanya disebut sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.

Implementasi kebijakan dan analisis kebijakan retrospektif yang dilakukan dalam pengembangan UMKM berbasis rumah di 5 (lima) wilayah studi dilihat pada Tabel 1 berdasarkan peraturan daerah masing-masing terkait dengan pemberdayaan UMKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengarah pada analisis kebijakan pemerintah terkait pemberdayaan UMKM terhadap perkembangan usaha di 5 (lima) wilayah studi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berdasarkan analisis kebijakan retrospektif yang dilakukan (Tabel 2), wilayah studi dengan implementasi kebijakan pemerintah yang optimal dalam upaya pemberdayaan UMKM berbasis rumah yaitu Boyolali dengan usaha kerajinan logam. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UKM yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha logam yang cukup baik,

dikarenakan kegiatan fasilitasi berupa pengembangan sarana produksi, pelatihan, dan pemasaran sudah terpenuhi. Dengan adanya implementasi kebijakan tersebut, kerajinan logam mengalami perkembangan sehingga mempengaruhi keberlangsungan usaha.

“Kalau peran dari pemerintah sudah banyak, ada pelatihan, bantuan peralatan, pameran, dan juga membantu pemasaran. Itu biasanya dari dinas perindustrian, dinas koperasi, dan dinas pariwisata” (Agus Susilo, Pengusaha Muda Tama Gallery).

Demikian juga program pengembangan system pendukung pengembangan UMKM, yang walaupun belum sempurna, namun dirasakan kemajuan dan manfaatnya. Untuk kota lain, kebijakan dan program pendukung terhadap UMKM sudah dilakukan, namun belum optimal.

Tabel 1. Kebijakan Pendukung UMKM Berbasis Rumah

PERATURAN DAERAH	KEBIJAKAN LOKAL		
	PEMERINTAH YANG TERLIBAT	KEBIJAKAN	TARGET KEBIJAKAN
SEMARANG (BANDENG)			
Peraturan Daerah Tentang Pemberdayaan UMKM Semarang	<ul style="list-style-type: none">Dinas Koperasi dan UMKMDinas Perindustrian dan Perdagangan	Upaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan kualitas pelayanan bagi pelaku UMKM	Pelaku UMKM dapat memiliki sertifikasi kompetensi dan mampu menguasai teknologi, maka daya saing akan semakin kuat dan mampu menembus pasar ekspor.
SURABAYA (LONTONG)			
Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2017	<ul style="list-style-type: none">Dinas Koperasi dan UMKMDinas Perindustrian dan Perdagangan	Program pengembangan sistem pendukung usaha	Jumlah kegiatan promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk UMKM
			Jumlah kegiatan fasilitasi akses permodalan usaha dengan lembaga keuangan/perbankan bagi 125 UMK
		Program standarisasi produk UMK	Fasilitasi Pendampingan Manajemen Usaha Mikro
SOLO (BATIK)			
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan UMKM Surakarta	Dinas Koperasi dan UMKM	Kebijakan teknis pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM)	Untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam usaha
		Program Desa Wisata (Kemendes PDTT) Tahun 2017	Untuk meningkatkan sumber daya manusia

PERATURAN DAERAH	KEBIJAKAN LOKAL		
	PEMERINTAH YANG TERLIBAT	KEBIJAKAN	TARGET KEBIJAKAN
			yang kreatif dan mempunyai kemandirian dalam menjalankan usaha bisnisnya, dan menghasilkan produk berkualitas yang dapat bersaing di tingkat lokal maupun global.
BOYOLALI (LOGAM)			
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali Tahun 2017	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Program pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UKM	Meningkatnya Kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat serta menurunnya ketimpangan pendapatan
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM	Terciptanya sistem informasi daerah
SALATIGA (MAKANAN OLAHAN)			
Penetapan Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM Kota Salatiga Tahun 2016	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	Kegiatan Promosi Produk UMKM	Terpromosinya produk unggulan Salatiga di tingkat Regional dan meningkatnya omzet produk UMKM
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang APBD Lampiran III 2017		Pembinaan dan pendampingan UMKM	-
		Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	-
Program Prioritas RPJMD Kota Salatiga Tahun 2014		Program penetapan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	Tercapai target diberdayakannya 1000 UMKM di Kota Salatiga
		Program Pengembangan Klaster Bisnis	Meningkatnya kemampuan produksi pelaku usaha
			Meningkatnya kemampuan produksi IKM
		Program Pembinaan Kemampuan Teknologi industri.	Tersedianya sarana klaster industri Salatiga berwawasan lingkungan

Tabel 2. Analisis Kebijakan Retrospektif UMKM Berbasis Rumah

KEBIJAKAN	PERAN PEMERINTAH (TEMUAN DI LAPANGAN)		HASIL FGD	ANALISIS
	KONDISI	CHECKLIST		
SEMARANG				
Peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan Pengendalian kegiatan perikanan, dalam rangka peningkatan peningkatan peluang usaha	Terdapat sosialisasi pengolahan ikan untuk pelaku usaha di Kampung Bandeng Krobokan	√	Usaha ini masuk ke dalam kelembagaan klaster, sekaligus menjadi makanan khas daerah Kota Semarang. Hal ini menjadikan Klaster Bandeng mendapatkan bantuan dari FEDEP	Adanya kolaborasi peran pemerintah antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Ketenagakerjaan di Kota Semarang mendukung pelaku usaha untuk mengolah hasil perikanan untuk dijadikan olahan Bandeng sebagai produk unggulan daerah.
Upaya peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pelayanan bagi pelaku UMKM	Pelatihan pengolahan Bandeng	√	Terdapat bantuan dari CSR yang melakukan kerja sama dengan pemerintah berupa alat dan pelatihan.	Peningkatan mutu sumber daya manusia untuk pelaku usaha yang dilakukan pemerintah cukup baik, dikarenakan penyelenggaraan kegiatan tersebut mencakup seluruh aspek usaha
SURABAYA				
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Promosi penjualan menjadi destinasi wisata	√	-	Program pengembangan sistem pendukung usaha Pengembangan sistem pendukung usaha Lontong yang dilakukan pemerintah cukup baik, namun masih terdapat aspek yang belum dipenuhi yaitu akses permodalan usaha
Fasilitasi akses permodalan usaha dengan lembaga keuangan/perbankan	-	x	-	
Fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha skala mikro	-	x	-	Program standarisasi produk UMK Standarisasi produk usaha Lontong yang dilakukan pemerintah cukup baik, namun masih terdapat aspek yang belum dipenuhi yaitu fasilitasi legalitas dan standarisasi usaha skala mikro
Pelatihan peningkatan mutu produk dan manajemen usaha bagi pelaku usaha skala mikro	Adanya manajemen koperasi	√	-	
SOLO				
Pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2012	Pelatihan dan seminar tentang ekspor dan manajemen produk batik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta sejak tahun 2004	√	<ul style="list-style-type: none">• Terdapat kemudahan pinjaman modal di koperasi• Adanya kemudahan perizinan	Kebijakan teknis pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha

KEBIJAKAN	PERAN PEMERINTAH (TEMUAN DI LAPANGAN)		HASIL FGD	ANALISIS
	KONDISI	CHECKLIST		
			<ul style="list-style-type: none"> Adanya penguatan kelembagaan 	cukup baik, dikarenakan terdapat pelatihan yang diperuntukkan pelaku usaha Batik
Pengembangan usaha batik melalui Program <i>one village, one product</i> , di Kota Surakarta	Pengembangan Kampung Wisata Batik	√	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pameran yang meningkatkan pemasaran Pemasaran warna sintetis merupakan proses produksi lama Kapasitas produksi (SDM) dengan pengrajin dari luar kurang kuat 	Program Desa Wisata (Kemendes PDTT) Tahun 2017 Dengan adanya program desa wisata sebagai upaya pengembangan desa/kampung, usaha Batik di Solo turut serta dalam pengembangan Kampung Wisata Batik sehingga secara tidak langsung mendukung pemasaran Batik, namun penjualan terkendala pada jenis batik dengan warna sintetis dan produk dari luar daerah
BOYOLALI				
Pengembangan sarana promosi hasil produksi	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan pameran berskala nasional, seperti Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2018 oleh KPwBI Solo (https://semarang.bisnis.com) 	√	Terdapat <i>showroom</i> yang sudah digunakan oleh pelaku usaha	Program pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UKM Pengembangan usaha dan keunggulan kompetitif UKM yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan usaha Logam cukup baik, dikarenakan kegiatan fasilitasi berupa pengembangan sarana produksi, pelatihan, dan pemasaran sudah terpenuhi
Kegiatan penyelenggaraan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan dan seminar tentang ekspor dan manajemen barang yang dilakukan rutin dalam 3 bulan sekali Kegiatan pendampingan oleh KPwBI Solo untuk memperkuat proses bisnis Klaster Logam Tumang. (https://semarang.bisnis.com) 	√	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pelatihan untuk <i>packaging</i> Adanya temu bisnis antar pelaku usaha Memiliki peluang untuk impor produk Regenerasi dalam industri masih sulit 	
Fasilitasi pemasaran produk UMKM di wilayah lokal regional maupun internasional yaitu di Moskow	Kerajinan Logam mengikuti pameran produk logam dan tembaga tahun 2017 di Moskow, Rusia (https://m.industry.co.id)	√	Terdapat pemasaran secara <i>online (marketplace)</i>	
Kegiatan fasilitasi: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah 	Adanya pameran yang diadakan untuk meningkatkan pemasaran	√	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat bantuan berupa pemasaran 	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM Pengembangan sistem

KEBIJAKAN	PERAN PEMERINTAH (TEMUAN DI LAPANGAN)		HASIL FGD	ANALISIS
	KONDISI	CHECKLIST		
tangga, industri kecil dan industri menengah • Promosi produk UMKM			(UKM Centre) dan pelatihan • Koordinasi antar instansi masih kurang	pendukung usaha Logam cukup baik, namun masih terdapat kegiatan fasilitasi yang belum dipenuhi seperti pembinaan usaha.
SALATIGA				
Pembinaan dan pendampingan UMKM	Belum ada peran pemerintah untuk pengembangan usaha dalam pendataan dan pembuatan profil usaha Singkong	x	Izin usaha di tingkat kecamatan	Peran pemerintah dalam pengembangan usaha makanan di Salatiga belum optimal, dikarenakan program yang ada belum direalisasikan.
Program Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Belum ada peran pemerintah untuk pengembangan usaha dalam sarana pemasaran Singkong Keju	x	Terdapat kajian perencanaan pusat oleh-oleh di Salatiga	
Kegiatan Promosi Produk UMKM	Upaya dalam menumbuhkan iklim usaha makanan olahan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berupa pameran produk	✓	Bantuan dari FEDEP berupa alat pendukung usaha dan upaya pemasaran	Pengembangan sarana pemasaran usaha oleh pemerintah cukup baik, karena terdapat kegiatan pameran untuk mempromosikan produk makanan di Salatiga
Pemberian akses permodalan bagi UMKM	Adanya pengembangan akses pelayanan modal dari kredit usaha rakyat BRI sejak tahun 2008	✓	Ketersediaan modal masih minim	Program penetapan kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Pengembangan sistem pendukung usaha makanan belum optimal, namun masih terdapat kegiatan fasilitasi yang belum dipenuhi dalam hal proses produksi dan kemitraan usaha.
Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan UMKM	Belum ada peran pemerintah untuk pengembangan usaha dalam memfasilitasi kemitraan usaha Singkong dengan pihak lain	x	Adanya rencana untuk alat dan bantuan bagi usaha yang sudah berbadan hukum melalui paguyuban sesuai dengan Permendagri no.32	
Penyelenggaraan Pembinaan Produksi Usaha	Terdapat pelatihan sejak tahun 2009	✓	Bantuan dari FEDEP seperti pelatihan pengembangan usaha	
Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga	Belum ada peran pemerintah untuk pengembangan usaha dalam proses pencarian bahan baku dan proses produksi Singkong Keju	x	Sulit mendapatkan bahan baku (tergantung pada pemasok/petani yang menanam singkong)	
Penyelenggaraan	Sosialisasi pengolahan	✓	Kondisi	

KEBIJAKAN	PERAN PEMERINTAH (TEMUAN DI LAPANGAN)		HASIL FGD	ANALISIS
	KONDISI	CHECKLIST		
Pembinaan Industri Berwawasan Lingkungan	limbah		infrastruktur seperti jalan, IPAL, dan listrik masih perlu dilakukan perbaikan	

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kebijakan retrospektif dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah di masing-masing daerah telah memberikan perhatian terhadap perkembangan UMKM di daerahnya. Menurut Dunn (2000), analisis retrospektif digunakan untuk menganalisis sebab dan konsekuensi dari kebijakan yang telah diambil, sehingga dapat menjadi pembelajaran (*lesson learnt*) pengembangan UMKM berbasis rumah. Dengan model evaluatif, pendekatan ini dilakukan terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Analisis tersebut diarahkan pada salah satu analisis yang berorientasi pada penerapan. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah menerangkan sebab dan konsekuensi yang ada dengan melakukan identifikasi tujuan dan sasaran kebijakan dari para pembuat kebijakan dan pelaku kebijakan.

Wilayah studi dengan implementasi kebijakan pemerintah yang optimal dalam upaya pemberdayaan UMKM berbasis rumah yaitu Boyolali dengan usaha kerajinan logam, namun masih terdapat kebijakan pemerintah yang belum optimal. Hal tersebut diketahui dari implementasi kebijakan daerah pada masing-masing UMKM. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah sehingga dapat mengotimalkan kebijakan daerah yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi serta pemantauan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah daerah dan juga pelaku usaha perlu belajar dari daerah lainnya untuk mengembangkan inovasi UMKM.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Studi ini didanai oleh Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Universitas Diponegoro Tahun 2018-2019.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Broaddus, A. (2012). eScholarship Provides Open Access, Scholarly Publishing Services to The University of California and Delivers A Dynamic Research Platform to Scholars Worldwide. *Berkeley Planning Journal*, 4(3), 217-220. Doi: [10.5811/westjem.2011.5.6700](https://doi.org/10.5811/westjem.2011.5.6700)
- Caniëls, M. C., Lenaerts, H. K., & Gelderman, C. J. (2015). Explaining The Internet Usage of SMEs. *Internet Research*, 25(3), 358-377. Doi: [10.1108/IntR-12-2013-0266](https://doi.org/10.1108/IntR-12-2013-0266)
- Carl, V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2012). Basic Methods of Policy (3rd ed., <https://doi.org/10.4324/9781315664736>). New York: Routledge.
- Cropper, M., Fraas, A., & Morgenstern, R. (2017). Looking Backward to Move Regulations Forward. *Science*, 355(6332), 1375-1376. Doi: [10.1126/science.aaj1469](https://doi.org/10.1126/science.aaj1469)
- Cropper, M. L., Morgenstern, R. D., & Rivers, N. (2018). Policy Brief—Facilitating Retrospective Analysis of Environmental Regulations. *Review of Environmental Economics and Policy*, 12(2), 359-370. Doi: [10.1093/reenp/rey011](https://doi.org/10.1093/reenp/rey011)
- Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=psY-NwAACAAJ>.
- Fadli, A. (2017). Kemenkop Gelar Pelatihan Perkoperasian Bagi Perajin Tembaga,

- Industry.co.id. Retrieved from <https://m.industry.co.id/amp/read/4389/kemenkop-gelar-pelatihan-perkoperasian-bagi-perajin-tembaga>
- Gough, K. (2010). Continuity and Adaptability of Home-Based Enterprises: A Longitudinal Study from Accra, Ghana. *International Development Planning Review*, 32(1), 45-71. Doi: 10.3828/idpr.2009.12
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World* (<https://doi.org/10.2307/j.ctt1m323qj>). Jersey: Princeton University Press.
- Hüschelrath, K., & Leheyda, N. (2010). A Methodology for The Evaluation of Competition Policy. *European Competition Journal*, 6(2), 397-425. Doi: 10.5235/174410510792283781
- Keban, Y. T. (2004). *Enam Dimensi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- KelleTT, P. (1995). *Constructing Home: Production and Consumption of Popular Housing in Northern Colombia*. (Ph.D Thesis), University of Newcastle Upon Tyne.
- Leonard, L. (2018). Bank Indonesia Solo Dorong Tumang Genjot Ekspor, *Semarang.bisnis.com*. Retrieved from <https://semarang.bisnis.com/read/20181017/536/850194/bank-indonesia-solo-dorong-tumang-genjot-ekspor>
- Lutter, R. (2013). Regulatory Policy: What Role for Retrospective Analysis and Review? *Journal of Benefit-Cost Analysis*, 4(1), 17-38. Doi: 10.1515/jbca-2012-0012
- Moja, T. (2003). "Policy analysis," Research in the College Context: Approaches and Methods, 169-181. Doi: <https://doi.org/10.4324/9780203952740>
- Nohong, M., Sanusi, A., Nurqamar, I. F., & Harun, S. (2018). Strategic Model in Increasing The Smes Competitive Advantage in South Sulawesi. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 25(2), 57-65.
- Osano, H. M. (2019). Global Expansion of SMEs: Role of Global Market Strategy for Kenyan SMEs. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 8(1), 13. Doi: 10.1186/s13731-019-0109-8
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy* (Doi: <https://books.google.co.id/books?id=hZBHAAAAMAAJ>). Michigan: Brooks/Cole.
- Samtono, S. (2016). Dinamika Pengelolaan dan Pertumbuhan Usaha Kecil Pabrik Kerupuk Tapioka "Rejo" Blotongan Salatiga. *Among Makarti*, 9(17), 21-37.
- Solichin, A. W. (1987). *The Functioning of Pancasila Ideology in Indonesian Political System Under The New Order Government*. Netherland: The Hague.
- Tipple, G. (2004). Settlement Upgrading and Home-Based Enterprises: Discussions from Empirical Data. *Cities*, 21(5), 371-379. Doi: 10.1016/j.cities.2004.07.006
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Method*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=FzawlAdilHkC>